

## ANALISIS KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA DI KECEMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

Nadiya Tamau<sup>1</sup>, Nurfaika<sup>2</sup>, Rusiyah<sup>3</sup>

1,2,3 Pendidikan Geografi, Jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, FMIPA, Universitas Negeri Gorontalo

\*Email Koresponden: [rusiyah@ung.ac.id](mailto:rusiyah@ung.ac.id)

---

Diterima: 03-10-2024

Disetujui: 03-11-2024

Publish: 31-12-2024

---

**Abstract :** Kecamatan Kabila Bone adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pesisir pantai, yang memungkinkan banyak tempat wisata pantai dan wisata bahari di daerah tersebut. Terdapat tiga objek wisata unggulan di daerah tersebut yang cukup populer serta memiliki potensi pengembangan, dan potensi ekowisata antara lain Objek Wisata Kurenai, Objek Wisata Hiu Paus, dan Objek Wisata Botutonuo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata, Untuk mengetahui apakah ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata tersebut sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata No 3 tahun 2018. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Objek Wisata Kurenai terdapat 6 sarana prasarana. Sarana prasarana pada objek wisata tersebut belum ada sama sekali yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pariwisata. Pada Objek Wisata Hiu Paus tersedia 9 sarana prasarana, beberapa sarana prasarana yang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yaitu akses jalan setapak, gazebo, dan gapura identitas. Sementara pada Objek Wisata Botutonuo tersedia 8 sarana prasarana. Adapun sarana prasarana yang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yaitu akses jalan setapak, tempat parkir, gazebo, dan gapura identitas, selebihnya sarana prasarana yang tersedia belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata.

**Kata kunci :** Ketersediaan sarana dan prasarana Objek wisata

**Abstract:** *Kabila Bone District is one of the districts in Bone Bolango Regency, part of which is dominated by coastal areas. There are three leading tourist attractions in the area that are quite popular and have high development potential and ecotourism potential, including the Kurenai Tourist Attraction, the Whale Shark Tourist Attraction, and the Botutonuo Tourist Attraction. This study aims to analyze the availability of infrastructure at tourist attractions, to determine the suitability between the infrastructure at the tourist attraction and the Standards of the Minister of Tourism Regulation No. 3 of 2018. Data collection in this study used observation and interview methods, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study showed that there were 6 infrastructure at the Kurenai Tourist Attraction. The infrastructure at the tourist attraction did not comply with the standards of the Minister of Tourism Regulation. At the Whale Shark Tourist Attraction, there are 9 infrastructure facilities, some of which are in accordance with the Standards of the Minister of Tourism Regulation, namely footpath access, gazebos, and identity gates. While at the Botutonuo Tourist Attraction, there are 8 infrastructure facilities. The facilities and infrastructure that are in accordance with the Minister of Tourism Regulation Standards are access to footpaths, parking lots, gazebos, and identity gates, the rest of the available facilities and infrastructure are not in accordance with the Minister of Tourism Regulation.*

**Keywords:** *Availability of facilities and infrastructure Tourist attractions*

### 1. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah industri yang selalu berubah yang melibatkan banyak orang, baik individu maupun kelompok, dan menggerakkan banyak usaha. Wisatawan, komponen geografi, dan industri pariwisata adalah tiga komponen utama yang membentuk kegiatan pariwisata. Sektor wisata terdiri dari wisatawan. Bagi sebagian orang, bahwa pariwisata adalah salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu daerah. Pariwisata telah lama diakui sebagai bagian penting dari upaya untuk menunjukkan dan mempromosikan potensi yang dimiliki setiap wilayah. Hal ini terjadi apabila terdapat kerja sama dan kolaborasi antara masyarakat dan penggerak pariwisata lainnya. (Megawan & Suryawan, 2019).

Menurut Suwanto dalam (Jayanti, 2019) pariwisata adalah suatu proses perjalanan dari satu

tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan maupun kelompok. Pariwisata diadakan karena berbagai kepentingan, seperti kepentingan budaya, sosial, agama, atau kepentingan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan serta memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Pariwisata secara umum didefinisikan sebagai perjalanan singkat dari satu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semula. Berdasarkan Undang-Undang No.109 Tahun 2009 pariwisata terdiri dari berbagai fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh pengunjung, pengusaha, pemerintah federal, dan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Purwanto dalam (Welhelmina, 2020) terdapat tujuh dimensi kualitas produk atau objek wisata yang berhubungan dengan tingkat kepuasan wisatawan dan terkait satu sama lain. Kualitas objek wisata terdiri dari tujuh dimensi, yaitu atraksi (daya tarik objek) informasi, fasilitas umum, sumber daya manusia, pelayanan, kebersihan, dan aksesibilitas. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara kualitas dimensi yang satu dengan lainnya dan berkaitan dengan tingkat kepuasan wisatawan.

Salah satu pendekatan pengembangan pariwisata adalah pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Hal ini karena sarana dan prasarana wisata merupakan fasilitas penting yang menunjang kegiatan pariwisata. Dalam suatu objek wisata sarana prasarana memiliki dua peran penting yakni membantu memenuhi kebutuhan wisatawan dan menjaga keseimbangan lingkungan pariwisata (Fajriah & Mussadun, 2014). Adanya sarana yang memadai meningkatkan kualitas objek wisata selama kegiatan pariwisata. Sarana pariwisata adalah suatu komponen yang sangat penting yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata berjalan lancar. Sarana pariwisata juga merupakan suatu hal yang keberadaannya dapat melengkapi dan memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar (Ghani, 2017). Salah satu indikator perkembangan pariwisata adalah prasarana dan sarana pariwisata, yang dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan, pelayanan tanpa adanya hambatan dalam pembenahan kualitas hotel, tempat makan, hiburan, dan sebagainya, serta infrastruktur jalan dan transportasi yang strategis dan mudah diakses oleh wisatawan.

Kabupaten Bone Bolango di sebelah timur Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata. Wisata alam, wisata budaya, dan wisata bahari adalah beberapa potensi pariwisatanya. Keanekaragaman potensi ini merupakan modal yang sangat baik untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah dan meningkatkan PAD. Keragaman potensi tersebut merupakan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan (Suly Eraku et al., 2020). Kecamatan Kabila Bone adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pesisir pantai, yang memungkinkan banyak tempat wisata pantai dan wisata bahari di daerah tersebut. Terdapat tiga objek wisata unggulan di daerah tersebut yang cukup populer serta memiliki potensi pengembangan, dan potensi ekowisata antara lain Objek Wisata Kurenai, Objek Wisata Hiu Paus, dan Objek Wisata Botutonuo. Untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik terhadap objek wisata tidak hanya dilihat dari potensinya saja akan tetapi diperlukan dukungan sarana prasarana yang memadai. Sarana Prasarana yang memadai dapat menjadi salah satu penunjang yang tidak kalah penting untuk meningkatkan daya tarik wisata agar banyak diminati wisatawan (Gamtohe et al., 2019)

Peraturan Menteri Pariwisata No 3 tahun 2018 menjelaskan standar kriteria sarana prasarana pendukung yang harus ada pada objek wisata. Standar-standar ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata yang berkelanjutan agar dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan.

Ketersediaan sarana prasarana pada Objek Wisata Kurenai, Objek Wisata Hiu Paus dan Objek Wisata Botutonuo belum diketahui secara pasti apakah telah sesuai dengan standar sarana prasarana yang terdapat pada peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2018. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian mengenai ketersediaan sarana prasarana pada beberapa objek wisata tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan sarana prasarana objek wisata di Kecamatan Kabila Bone lebih khususnya pada Objek Wisata Kurenai, Objek Wisata Hiu Paus dan Objek Wisata Botutonuo. Untuk melihat sejauh mana ketersediaan sarana dan prasarana pada objek wisata tersebut sesuai dengan Standar Kriteria Peraturan Menteri Pariwisata.

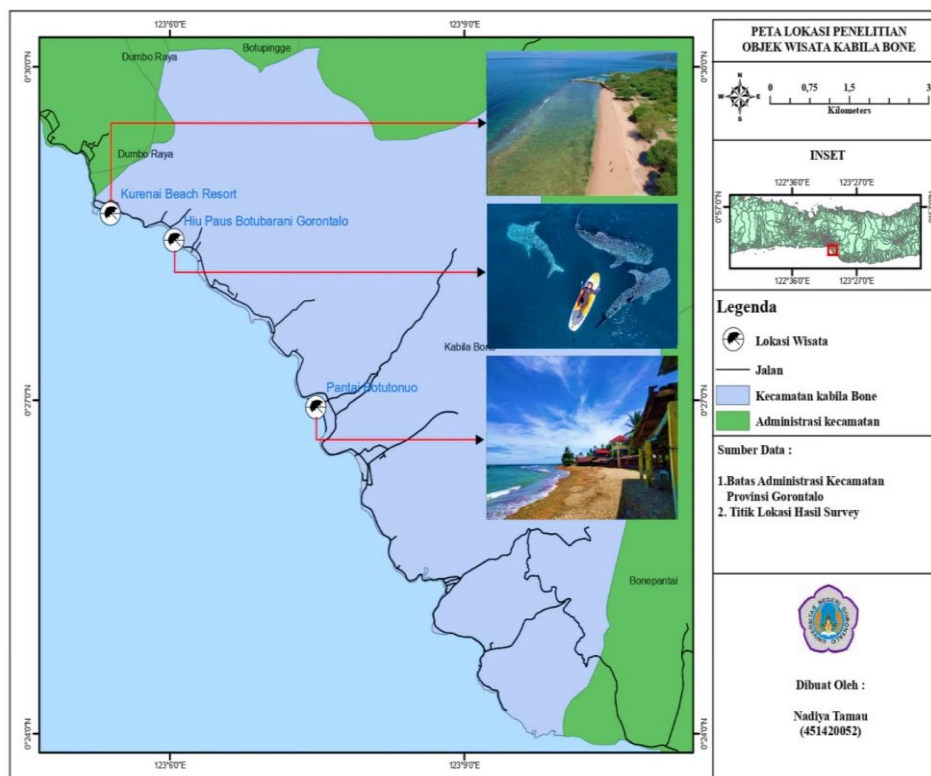
## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang berfokus pada tiga Objek wisata yaitu Objek Wisata Pantai Kurenai, Objek Wisata Hiu Paus dan Objek Wisata Botutonuo. (Gambar 1)

### 2.2 Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data yang diperoleh adalah data kualitatif sehingga untuk menganalisis diperlukan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pariwisata.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Objek Wisata Kurenai

Peraturan Menteri Pariwisata No 3 tahun 2018 menetapkan sebelas indikator sarana prasarana sebagai standar untuk menilai ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata. Berikut hasil analisis terkait ketersediaan sarana prasarana Objek Wisata Kurenai.

#### Akses Jalan

Berdasarkan hasil analisis, pada Objek Wisata Kurenai telah tersedia akses jalan lokal memiliki kondisi jalan cukup baik namun jalan lokal tersebut belum sesuai Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini karena lebar jalan lokal hanya 4,70 meter sementara pada Standar Peraturan Menteri Pariwisata lebar jalan minimum 5-6 meter dan untuk akses jalan setapak dan jalur pedestrian belum tersedia pada objek wisata.

### **Pusat Informasi**

Dalam wisata, pusat informasi sangat penting karena dapat membantu wisatawan mengetahui lebih banyak tentang tempat wisata sebelum melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Pada Objek Wisata Kurenai belum tersedia terkait pusat informasi, perlunya untuk pengadaan pusat informasi terkait objek wisata, hal ini bertujuan agar wisatawan dapat dengan mudah memperoleh, informasi seputaran wisata sebelum melakukan aktivitas wisata di daerah tujuan, serta untuk penempatannya disesuaikan dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata

### **Toilet atau Ruang Ganti**

Menurut (Widyanti et al., 2020) Ketersediaan toilet umum adalah bagian penting dari kebutuhan setiap orang, fungsi toilet tidak hanya untuk buang hajat. Pengelolaan toilet umum harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menyelamatkan, menyehatkan, mengamankan, memudahkan, dan menyamankan baik pengguna maupun pengelola. Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pariwisata. Kondisi toilet/ruang ganti, pada Objek Wisata Kurenai belum cukup memadai beberapa fasilitas pendukung untuk toilet belum tersedia seperti wastafel, tisu toilet, jetspray, handicap sehingga terkait ketersediaan toilet atau ruang ganti belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Papan Petunjuk Arah**

Menurut (Purwita & Yasa, 2019) Papan petunjuk arah sangat penting untuk pariwisata karena berfungsi sebagai penanda dan penunjuk arah yang membantu pengunjung menemukan jalan ke tempat-tempat menarik. Papan petunjuk arah pada Objek Wisata Kurenai belum tersedia, baik pada persimpangan jalan menuju objek wisata dan di sekitar area objek wisata. Perlunya untuk pengadaan papan petunjuk arah pada area masuk objek wisata, arah menuju toilet atau kamar mandi, arah menuju tempat makan, arah menuju tempat ibadah, dan arah menuju tempat parkir tujuannya memudahkan wisatawan untuk menuju ke lokasi wisata dan memudahkan wisatawan menuju ke suatu tempat di area wisata misalnya ingin ke warung makan, atau ke tempat parkir. Dalam pengadaan dan penempatan petunjuk arah tersebut disesuaikan dengan Standar Kriteria Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Pergola dan Gazebo**

Pada Objek Wisata Kurenai tidak tersedia sama sekali pergola maupun gazebo pengunjung yang ingin beristirahat hanya mengandalkan tikar yang disewakan oleh pemilik warung di sekitar objek wisata, perlu adanya penyediaan fasilitas pergola dan gazebo ini karena sebagai salah satu fasilitas penunjang pada objek wisata dimana sebagai tempat peristirahatan dan bersantai bagi wisatawan.

### **Tempat Ibadah**

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan sarana ibadah pada objek wisata belum sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini karena dari desain bangunan tidak ada unsur keunikan, kapasitas ruangan pada tempat ibadah hanya dapat menampung 8 orang, serta kelengkapan fasilitas kebutuhan beribadah masih sangat kurang seperti belum terdapat tempat wudhu khusus dan layak pada tempat ibadah, serta tempat berwudhu yang belum dibuat terpisah untuk pria dan wanita. Perlunya sarana prasarana yang memadai yang sesuai dengan harapan-harapan wisatawan yang berkunjung di objek wisata tersebut.

### **Gapura Identitas**

Menurut (Ani Dwi Yanti, 2023) Pembuatan gapura merupakan suatu cara efisien dan tidak kalah penting dalam membentuk ciri khas atau identitas pariwisata serta berguna dalam pengembangan suatu objek wisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk kriteria desain gapura dan kriteria penempatan gapura identitas belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini dikarenakan penanda identitas objek wisata tidak seperti desain gapura pada umumnya yang dibangun berdiri dengan dua tiang penyangga. Penanda pada Objek Wisata Kurenai hanya terbuat dari material beton dengan ukuran tidak terlalu besar bertuliskan Pantai Kurenai sehingga penanda identitas objek wisata sulit terlihat sebagai penanda. bagi wisatawan yang baru pertama kali pasti akan kesulitan mengenali objek wisata tersebut.

### **Tempat Parkir**

Untuk memaksimalkan ruang parkir yang tersedia, tempat parkir harus memiliki layanan parkir yang

efisien (Sudipta Giri et al., 2023). Berdasarkan hasil analisis ketersediaan tempat parkir pada Objek Wisata Kurenai belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata, hal ini disebabkan belum terdapat penataan satuan ruang parkir karena belum adanya pelataran taman parkir khusus di tempat wisata, sehingga semua jenis kendaraan bebas memarkirkan kendaraan dimana saja dan belum terdapat pengelompokkan untuk masing-masing jenis kendaraanya baik mobil, bus dan motor sehingga tempat parkir tidak tertata dan tidak beraturan.

### **Tempat Makan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pada Objek Wisata Kurenai terdapat kurang lebih 19 unit tempat makan dan beberapa kios kecil yang menjual cemilan. Dari banyaknya tempat makan pada objek wisata semuanya belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Beberapa tempat makan yang telah di observasi rata rata kapasitas ruangan tidak dapat menampung lebih dari 20 orang dan beberapa fasilitas penunjang yang dibutuhkan pada tempat makan belum memadai seperti ketersediaan kursi dan meja sangat kurang, tidak terdapat tempat cuci tangan dan lain lain. Diperlukan pembenahan dan peningkatan fasilitas tempat makan disekitar wisata agar dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan wisatawan.

### **Lampu Penerangan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa penempatan lampu penerang yang ditentukan dalam Standar Peraturan Menteri Pariwisata belum sesuai dengan kondisi eksisting pada objek wisata. Ketersediaan penerangan pada objek wisata hanya tersedia pada setiap warung makan, toilet dan tempat ibadah. pada Peraturan Menteri Pariwisata standar kriteria jarak minimum tiang lampu penerangan yang berdiri sendiri adalah 6-7 meter antar lampu dengan ketinggian 3-5 meter untuk penerangan jalur pedestrian dan ketinggian tiang lampu penerangan 18-30 meter untuk penerangan tempat parkir dan area rekreasi. Dengan melihat kondisi eksisting tersebut ketersediaan lampu penerangan pada Objek Wisata Kurenai belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Toko Souvenir**

Pada Objek Wisata Kurenai belum tersedia toko souvenir. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata nomor 3 tahun 2018 dalam suatu objek wisata menyediakan minimal satu unit toko souvenir atau tempat penjualan cendramata dan oleh oleh khas daerah setempat, dan untuk lokasinya harus strategis mudah diakses dan dekat dengan destinasi wisata serta memiliki identitas atau pengenal pada toko souvenir yang mudah terbaca dan terlihat oleh wisatawan

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada Objek Wisata Kurenai terdapat beberapa sarana prasarana yang belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata seperti jalan lokal, toilet, lampu penerangan, tempat makan, tempat parkir, gapura identitas dan tempat ibadah . Tidak adanya fasilitas penunjang seperti gazebo dan juga pergola yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Penerangan pada objek wisata kurang memadai baik di dalam maupun penerangan jalan sebelum menuju objek wisata. Tidak adanya rambu-rambu atau petunjuk arah sebelum memasuki area objek wisata sehingga masyarakat awam tidak mengetahui bahwa tempat tersebut sebagai tempat wisata.

## **3.2 Objek Wisata Hiu Paus**

Peraturan Menteri Pariwisata No 3 tahun 2018 menetapkan sebelas indikator sarana prasarana sebagai standar untuk menilai ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata. Berikut hasil analisis terkait ketersediaan sarana prasarana Objek Wisata Hiu Paus.

### **Akses Jalan**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada Objek Wisata Hiu Paus akses jalan lokal maupun jalan setapak pada Objek Wisata Hiu Paus telah tersedia dengan kondisi jalan yang cukup baik dan memadai namun untuk lebar belum sesuai Standar Peraturan Menteri Pariwisata, hal ini karena lebar jalan lokal hanya 4,50 meter sementara lebar jalan lokal pada Standar Peraturan Menteri Pariwisata minimal 5-6 meter.

### **Pusat Informasi**

Pada Objek Wisata Hiu Paus belum tersedia terkait pusat informasi, perlunya untuk pengadaan pusat informasi terkait objek wisata, hal ini bertujuan agar wisatawan dapat dengan mudah memperoleh, informasi seputaran wisata sebelum melakukan aktivitas wisata di daerah tujuan, serta untuk penempatannya disesuaikan dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Toilet /Ruang Ganti**

Ketersediaan ruang ganti/toilet pada Objek Wisata Hiu Paus belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang mendukung, beberapa fasilitas toilet yang belum tersedia pada objek wisata yaitu tisu toilet, jetspray dan handicap. Ketersediaan toilet pada Objek Wisata Hiu Paus belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Kedepannya untuk fasilitas untuk toilet dan ruang ganti perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.

### **Papan petunjuk arah**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa kriteria penempatan petunjuk arah acuan dari Standar Peraturan Menteri Pariwisata belum sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini karena tidak tersedianya petunjuk arah pada posisi persimpangan jalan sebelum tempat, atau lokasi yang ditujuh. Petunjuk arah hanya tersedia di sekitar objek wisata yang terletak tidak jauh dari arah masuk objek wisata.

### **Pergola dan Gazebo**

Pergola dan gazebo memiliki fungsi yang sama yakni sama sama menjadi tempat peneduh dan beristirahat pada objek wisata. Penempatan pergola dan gazebo pada Obyek Wisata Hiu Paus sudah memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini ditinjau dari penempatan gazebo berada pada area duduk atau area berkumpul dan sebagai peneduh pada jalur pedestrian.

### **Tempat Ibadah**

Pada objek wisata belum tersedia tempat ibadah, wisatawan hanya mengandalkan masjid di lingkungan desa apabila ingin melaksanakan solat. Pada objek wisata ini perlu adanya pengadaan tempat ibadah/mushola di sekitar objek wisata yang aksesnya mudah dijangkau dan untuk desain bangunan, luas ruangan serta fasilitas penunjang pada tempat ibadah disesuaikan dengan standar peraturan yang sudah ditetapkan.

### **Gapura Identitas**

Gapura identitas atau papan selamat datang sangat penting pada suatu objek wisata dengan adanya identitas yang jelas agar pengunjung atau wisatawan yang baru pertama kali ke lokasi wisata dapat dengan mudah mengenali dan mengingat destinasi dengan melihat atau melewati gapura (Nugraha & Manjorang, 2022). Berdasarkan hasil analisis ketersediaan gapura identitas sudah memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata hal ini ditinjau dari penemplantanya berada pada lokasi masuk daya tarik wisata yang terhubung dengan jalur lalu lintas utama dan mudah terlihat sebagai identitas /penanda sebuah objek wisata atau daya tarik wisata.

### **Tempat Parkir**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada Objek Wisata Hiu Paus belum tersedia pelataran taman parkir sehingga wisatawan hanya mengandalkan bahu jalan dan halaman rumah warga untuk memarkirkan kendaraan dengan hal ini satuan ruang parkir (SRP) untuk masing masing jenis kendaraan belum tertata. Berdasarkan Kondisi eksisting tersebut ketersediaan tempat parkir pada objek wisata belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Tempat Makan**

Pada Objek Wisata Hiu Paus sudah terdapat tempat makan, ketersediaan tempat makan belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata, hal ini karena kapasitas ruangan belum memadai yakni tidak dapat menampung 30 orang, kurangnya ketersediaan meja dan kursi, tidak tersedia meja pengering untuk alat makan dan rak simpan. Perlu adanya penambahan fasilitas pada tempat makan untuk menunjang kebutuhan wisatawan dan disesuaikan dengan standar kriteria yang ada.

### **Lampu Penerangan**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penempatan lampu penerang yang ditentukan dalam Standar Peraturan Menteri Pariwisata belum tersedia di sekitar objek wisata seperti pada tempat parkir,

jalan setapak. Penerangan hanya tersedia di sepanjang jalur pedestrian jarak antara tiang lampu berjarak 9 meter dengan ketinggian tiang 5 meter, pada standar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pariwisata jarak minimum tiang lampu penerangan yang berdiri sendiri adalah 6-7 meter antar lampu dengan ketinggian 3-5 meter. Ketersediaan lampu penerangan pada Objek Wisata Hiu Paus belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Toko Souvenir**

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan tempat souvenir pada objek wisata belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini dikarenakan beberapa kriteria yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak tersedia pada objek wisata yakni tidak terdapat bangunan khusus untuk penempatan souvenir dan tidak tersedia fasilitas penunjang untuk penjualan souvenir. Penjualan souvenir hanya berada di loket atau tempat pembelian karcis.

Pada Objek Wisata Hiu Paus tersedia 9 sarana prasarana, adapun sarana prasarana yang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yaitu akses jalan setapak, gazebo, dan gapura identitas. Sementara untuk sarana prasarana yang belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pariwisata yakni jalan lokal, toilet/ruang ganti, petunjuk arah, tempat parkir, tempat makan, lampu penerangan dan toko souvenir. Secara keseluruhan ketersediaan sarana prasarana. Pada Objek Wisata Hiu Paus belum sepenuhnya memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini dikarenakan beberapa sarana prasarana masih membutuhkan penambahan dan peningkatan kualitas pada fasilitas yang sudah tersedia. Seperti peningkatan fasilitas pada toilet, pengadaan tempat parkir khusus pada objek wisata, penambahan fasilitas pada warung makan, pengadaan lampu penerangan pada area area penting seperti jalan setapak, penambahan rambu petunjuk arah dan perlunya pengadaan musholla khusus pada objek wisata yang mudah diakses oleh wisatawan.

### **3.3 Objek Wisata Botutonuo**

Peraturan Menteri Pariwisata No 3 tahun 2018 menetapkan sebelas indikator sarana prasarana sebagai standar untuk menilai ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata. Berikut hasil analisis terkait ketersediaan sarana prasarana Objek Wisata Botutonuo.

#### **Akses Jalan**

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan akses jalan pada objek wisata baik jalan lokal, maupun jalan setapak telah tersedia. Ketersediaan akses jalan lokal pada objek wisata hanya memiliki lebar 4,50 meter, sementara dalam Standar Peraturan Menteri Pariwisata lebar jalan minimum 5-6 meter, sehingga ketersediaan akses jalan belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

#### **Pusat Informasi**

Pada Objek Wisata Botutonuo tidak tersedia pusat informasi. Kedepannya perlu untuk mengadakan pusat informasi karena sangat berguna bagi wisatawan untuk memperoleh informasi seputar wisata sebelum berkunjung ke tempat tujuan wisata, selain itu pusat informasi juga sebagai salah satu sarana yang harus ada pada objek wisata seperti pada pedoman Peraturan Menteri Pariwisata no 3 tahun 2018.

#### **Toilet/Ruang Ganti**

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan toilet atau ruang ganti pada objek wisata kurang memadai dan kurang terjaga kebersihannya, beberapa fasilitas pendukung untuk toilet juga belum tersedia seperti wastafel, handicap, toilet, jestspray, pengering tangan/tisu, cermin dan tempat sampah. Sehingga dapat disimpulkan toilet/ruang ganti belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

#### **Papan Petunjuk Arah**

Berdasarkan hasil analisis terkait ketersediaan petunjuk arah pada Objek Wisata Botutonuo belum tersedia baik dalam objek wisata maupun pada posisi persimpangan jalan seperti yang ditentukan dalam standar kriteria Peraturan Menteri Pariwisata

#### **Pergola dan Gazebo**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Objek Wisata Botutonuo telah tersedia pergola maupun gazebo dan penempatannya sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

#### **Tempat Ibadah**

Ketersediaan tempat ibadah pada objek wisata belum memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini karena fasilitas penunjang pada tempat ibadah masih kurang memadai seperti tempat wudhu yang kurang terawat dan tempat wudhu tersebut belum terpisah untuk pria dan wanita, serta belum tersedia petunjuk arah menuju tempat ibadah tersebut.

### **Gapura Identitas**

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan gapura identitas sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata. Hal ini ditinjau dari penempatannya sudah berada pada lokasi masuk daya tarik wisata yang terhubung dengan jalur lalu lintas utama serta mudah terlihat sebagai identitas /penanda suatu objek wisata atau daya tarik wisata.

### **Tempat Parkir**

Pada Objek Wisata Botutonuo sudah terdapat beberapa tempat parkir. Penentuan satuan ruang parkir pada objek wisata sudah dikelompokkan untuk masing-masing jenis kendaraannya, jenis kendaraan berupa motor ditampung dalam satu lahan kosong yang diperuntukan sebagai lahan parkir motor pada objek wisata, sementara untuk mobil diparkir pada satu tempat yang diperuntukan untuk parkir mobil. Pola parkir jenis kendaraan motor dan mobil membentuk pola parkir 1 sisi. Dapat disimpulkan ketersediaan tempat parkir sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata.

### **Tempat Makan**

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan warung makan pada Objek Wisata Botutonuo belum sepenuhnya memenuhi Standar Peraturan Menteri Pariwisata dilihat dari luas bangunan yang kurang dari 4 x 5 meter sehingga belum memenuhi kriteria, kapasitas ruangan yang tidak dapat menampung 30 orang tidak terdapat tempat cuci tangan, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya pada warung makan tersebut masih kurang dan belum memadai.

### **Lampu Penerang**

Berdasarkan hasil analisis ketersediaan lampu penerangan belum sesuai Standar Kriteria Peraturan Menteri Pariwisata, hal ini dikarenakan penempatan lampu penerangan yang ditentukan pada Standar Kriteria Peraturan Menteri Pariwisata hanya tersedia pada tempat parkir. Kondisi lampu penerangan pada tempat parkir tidak berupa tiang lampu melainkan hanya lampu yang menggantung pada kabel dengan ketinggian kurang lebih 2 meter, sehingga untuk pencahayaannya sangat minim dan tidak menjangkau area luas. Perlunya pengadaan lampu penerangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dengan standar kriteria jarak minimum tiang lampu penerangan yang berdiri sendiri adalah 6-7 meter antar lampu dengan ketinggian 3-5 meter untuk penerangan jalur pedestrian dan 18-30 meter digunakan untuk penerangan pada area parkir dan area rekreasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan, mengurangi resiko kecelakaan dan kejahatan dan memenuhi pelayanan dan kualitas pada fasilitas objek wisata.

### **Toko Souvenir**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada Objek Wisata Botutonuo belum tersedia toko souvenir. Kedepannya diperlukan pengadaan toko souvenir pada objek wisata, agar menjadi salah satu daya tarik wisatawan berkunjung pada wisata.

Terdapat beberapa sarana dan prasarana penunjang pada Objek Wisata Botutonuo namun masih ditemukan beberapa kekurangan (Hendra et al., 2021). Pada Objek Wisata Botutonuo tersedia 8 sarana prasarana. Dari hasil analisis pada Objek Wisata Botutonuo terdapat beberapa sarana prasarana yang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yaitu akses jalan setapak, tempat parkir, gazebo, dan gapura identitas. Adapun sarana prasarana yang belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yakni jalan lokal, fasilitas pada toilet/ruang ganti yang belum memadai, fasilitas tempat wudhu yang belum terpisah untuk pria dan wanita pada tempat ibadah, fasilitas penunjang pada tempat makan yang masih kurang, serta kurangnya penerangan baik di dalam objek maupun penerangan jalan sebelum menuju objek wisata agar jalan tidak terlihat sepi.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pada Objek Wisata Kurenai terdapat banyak fasilitas penting yang tidak sesuai Standar Peraturan Menteri Pariwisata seperti jalan lokal,



toilet, lampu penerangan, tempat makan, tempat parkir dan gapura identitas dan tempat ibadah. Tidak tersedianya fasilitas penunjang seperti gazebo dan juga pergola yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pengunjung. Penerangan pada objek wisata kurang memadai baik di dalam maupun penerangan jalan sebelum menuju objek wisata. Tidak adanya rambu-rambu atau petunjuk arah sebelum memasuki area objek wisata sehingga masyarakat awam tidak mengetahui bahwa tempat tersebut sebagai tempat wisata.

Pada Objek Wisata Hiu Paus tersedia 9 sarana prasarana, adapun sarana prasarana yang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yaitu akses jalan setapak, gazebo, dan gapura identitas. Sementara untuk sarana prasarana yang belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yakni jalan lokal, toilet/ruang ganti, petunjuk arah, tempat parkir, tempat makan, lampu penerangan dan toko souvenir. Secara keseluruhan ketersediaan sarana prasarana pada Objek Wisata Hiu Paus masih membutuhkan penambahan dan peningkatan kualitas pada fasilitas yang sudah tersedia. Seperti peningkatan fasilitas pada toilet, pengadaan tempat parkir khusus pada objek wisata, penambahan fasilitas pada warung makan, pengadaan lampu penerangan pada area area penting seperti jalan setapak dan perlunya pengadaan musholla khusus pada objek wisata yang mudah diakses oleh wisatawan

Pada Objek Wisata Botutonuo tersedia 8 sarana prasarana. Dari hasil analisis pada Objek Wisata Botutonuo terdapat beberapa sarana prasarana yang sudah sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yaitu akses jalan setapak, tempat parkir, gazebo, dan gapura identitas. Adapun sarana prasarana yang belum sesuai dengan Standar Peraturan Menteri Pariwisata yakni jalan lokal, fasilitas pada toilet/ruang ganti yang belum memadai, fasilitas tempat wudhu yang belum terpisah untuk pria dan wanita pada tempat ibadah, fasilitas penunjang pada tempat makan yang masih kurang, tidak tersedianya petunjuk arah serta kurangnya penerangan baik di dalam objek maupun penerangan jalan sebelum menuju objek wisata agar jalan tidak terlihat sepi.

## 5. REFERENSI

- Ani Dwi Yanti. (2023). Pembuatan Gapura " Welcome Agropark Karangsono " Sebagai Upaya Peningkatan Daya Tarik Wisata Desa Karangsono. 4(4), 3719–3728.
- Fajriah, S. D., & Mussadun. (2014). Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(2), 218. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7653>
- Gamtohe, F., Poli, H., Rengkung, M. M., & Maitara, P. (2019). ISSN 2442-3262 ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA DALAM TIDORE KEPULAUAN Abstrak *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 6(3), 581–590.
- Ghani, Y. A. (2017). Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat. IV(1), 22–31.
- Hendra, H., Syamsu Rijal, A. S., Jaya, R., & Nurfaika. (2021). Analisis Spasial Wisata Pantai Botutonuo Desa Botutonuo Menggunakan Foto Udara Orthofoto Hasil Pemotretan Dengan UAV, Spatial Analysis at Butotonuo Beach Tourism Object in Botutonuo Village Using Orthophoto Aerial Photograph as UAV Imaging Result. *Jurnal Sains Informasi Geografi [J SIG]*, 4(2), 58–67. <https://doi.org/10.31314/j>
- Jayanti, N. P. (2019). Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 141–146. <https://doi.org/10.31311/par.v6i2.5691>
- Megawan, M. B., & Suryawan, I. B. (2019). Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2), 239. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i02.p05>
- Nugraha, R. N., & Manjorang, F. B. (2022). Kajian Kelengkapan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

Terhadap Kepuasan Wisatawan di Destinasi Wisata Museum di Tengah Kebun Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6507–6518.

- Purwita, D. G., & Yasa, G. P. P. A. (2019). Perancangan Ulang Simbol Dan Papan Penunjuk Arah Pada Area Obyek Wisata Monkey Forest. *Jurnal Lentera Widy*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.35886/lenterawidya.v1i1.61>
- Septiawan, J., & Indrawati. (2021). Identifikasi Sarana Dan Prasarana Terhadap Kenyamanan Pengguna Wisata Embung Cerme Desa Sanggang. *Seminar Ilmiah Arsitektur*, 8686, 580–590.
- Sudipta Giri, I. K., Wirasutama, C. P., Darma Yoga, I. W. G., & Gede Mahardika, I. B. (2023). Perencanaan Desain Parkir Pada Kawasan Objek Wisata Pantai Kedungu Tabanan. *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, 12(2), 190–199. <https://doi.org/10.36733/jikt.v12i2.7903>
- Suly Eraku, S., Karmin Baruadi, M., Permana, A. P., Hendra, H., & Mohamad, N. (2020). POTENSI EKOWISATA PANTAI MOLOTABU KABUPATEN BONE BOLANGO BERDASARKAN ANALISIS SPASIAL EKOLOGIS (The Potential of Molotabu Beach Ecotourism, Bone Bolango Regency Based on Ecological Spatial Analysis). *Jurnal Sains Informasi Geografis*, 3(2), 100. <https://doi.org/10.31314/jsig.v3i2.668>
- Welhelmina, F. (2020). Pengaruh Kualitas Objek Wisata Terhadap Minat Berkunjung Wisatawan (Studi Pada Wisatawan Di Pantai Warna-Warni Oesapa, Kupang). *Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosia*, 01, 25–38.
- Widyanti, N. L. S., Anggreni, M. A., Sumardiana, I. N. J., Yasti, H., & Kurniansah, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Toilet Umum Di Daya Tarik Wisata Kuta Lombok Tengah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i1.39>
- Widyarini, I. G. A., & Sunarta, I. N. (2019). Dampak Pengembangan Sarana Pariwisata Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Di Wisata Alam Air Panas Angseri, Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(2), 217